

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN - INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Program Strata Satu (S1) dari ~~nama-nama~~

Nama : Averina Dativa Hutasoit
NPM : 18510357
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi ~~syarat-syarat akademik untuk mendaftarkan Ujian Skripsi guna memperoleh gelar~~

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi

Pembimbing Pendamping



Rimbun C.D Sidabutar, SE.,M.Si 1

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol,
S.E., M.Si., Akt., CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pramesti & Wulanditya dalam Studinya menjelaskan bahwa Kecurangan masih menjadi pusat perhatian media publik. Namun seiring berjalannya waktu ilmu akuntansi yang semakin berkembang memenuhi dinamika bisnis, tidak hanya memberikan kekuatan tetapi juga memberikan jalan bagi individu maupun kelompok untuk melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan akuntansi (*fraud*) merupakan sebuah tindakan ilegal atau kekeliruan yang dilakukan dengan sengaja.

Kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia masih berjalan sampai saat ini dimana dijadikan permasalahan oleh pelaku bisnis dunia. Kecurangan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain tetapi dapat menguntungkan bagi pelaku kecurangan tersebut.

Kecurangan akuntansi merupakan penghambat dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Kecurangan sebagai suatu tindakan ilegal yang dicirikan dengan memanipulasi yang disengaja dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi oleh orang luar maupun dalam organisasi. Menurut G. Jack Balogna dan Robert dalam Karyono (2013) Kecurangan akuntansi (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja umumnya diterapkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian.

Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Bukti adanya kecurangan dapat dilihat dalam bentuk kebijakan dan tindakan atau yang sengaja dilakukan untuk memanipulasi dan merugikan pihak lain.

Siallagan (2022) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal dapat menjadi alat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Lemahnya pengendalian internal yang dibangun dalam organisasi akan memberikan peluang bagi anggota organisasi untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengendalian internal yang dapat mengawasi dan mengarahkan pelaporan akuntansi. Jika pengendalian internal lemah maka informasi/data akuntansi tidak kompeten. Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang seharusnya meyakinkan bahwa tujuan akan dicapai dengan pengendalian yang efisiensi dan efektivitas operasi, serta penyajian laporan keuangan yang dapat di percaya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi modus operasi dari pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Informasi merupakan dasar dari pelaku kecurangan, kepentingan untuk memperoleh suatu keputusan mengenai apa yang akan atau tidak yang akan dilakukan, para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian intern.

Pengendalian Internal dapat tercapai apabila perusahaan yang secara terus menerus mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur yang telah dibuat secara berkesinambungan. Sistem pengendalian internal yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kecurangan akuntansi di lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dalam penerapan pengendalian internal agar meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Pengendalian internal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta komponen yang mewakilinya di perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Organisasi dan perusahaan yang mempunyai fungsi audit internal untuk mendeteksi terjadinya kecurangan akuntansi.

Moralitas individu menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kecurangan akuntansi. Moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Moralitas individu adalah kemampuan untuk memahami perlakuan yang benar dan salah. Individu atau organisasi yang memiliki penalaran moral yang rendah maka akan memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Sebaliknya, jika individu atau organisasi yang memiliki penalaran tinggi maka akan mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi. Pemahaman perlakuan yang tercakup didalamnya adalah tidak bertindak jahat, mampu memahami pilihan yang tidak pantas untuk dilakukan, dapat mengendalikan dorongan, dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan dibutuhkan peranan moral yang baik, dan komitmen yang kuat dari pemimpin untuk menjadi contoh bagi pegawai atau karyawannya dalam melakukan suatu hal. Dengan adanya moral yang baik

dan komitmen yang kuat dari pemimpin maka dapat membangun serta menegakkan organisasi agar terhindar dari kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Rhendi Umar mengatakan dalam <https://www.manado.tribunnews.com> bahwa salah satu contoh kasus korupsi di Sumatera Utara yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan bahwa empat anggota DPRD Sumatera Utara, terbukti bersalah menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara. Terbukti suap yang diterima keempat anggota DPRD tersebut masing-masing Rp477,5 juta, Rp960 juta, Rp835 juta, dan Rp504,5 juta. Uang tersebut diberikan agar keempat anggota DPRD Sumut tersebut memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013. Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 DAN 2015 serta APBD Perubahan TA 2014.

Berdasarkan sumber <http://www.bpk.go.id> Contoh kasus lainnya yaitu, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan dalam temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2007 mendapat opini dari BPK RI “Tidak Wajar (TW)”, pada tahun 2008-2013 BPK RI memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, dan pada tahun 2014-2018 BPK RI memberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Berdasarkan opini tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kenaikan yang signifikan, terutama mendapat opini WTP selama 5 kali pada tahun 2014-2018 akan tetapi opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian karena BPK masih menemukan permasalahan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dan Penelitian ini juga mengambil Objek Penelitian para pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui kecenderungan kecurangan akuntansi, Peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal dari masing-masing pegawai dan seberapa besar pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal agar mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas maka penulis membatasi penelitian ini pada bagian moralitas individu dan pengendalian internal untuk melihat pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Bagi Objek Peneliti

Menjadikan masukan agar dapat lebih meningkatkan pengendalian internal dan menegakkan moralitas individu agar mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kajian lebih lanjut tentang partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecurangan Akuntansi

Pengertian Kecurangan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Dionisia (2016) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :

- 1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.**
- 2. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, hal ini sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.**

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Pengertian *fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2016), adalah

“perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan secara sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang yang berada didalam atau di luar organisasi agar mendapatkan keuntungan sendiri maupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.”

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas asset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) menerjemahkan *fraud* sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Dari pengertian *fraud* di atas menunjukkan aspek dari *fraud* adalah penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*), dan niat (*intent*).

Berdasarkan pendapat di atas kecenderungan kecurangan akuntansi diartikan sebagai tindakan/perbuatan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan, penyimpangan aset, penipuan yang didasari oleh niat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang secara tidak langsung ada tindakan yang dirugikan.

2.1.2 Sumber Kecurangan

Pada dasarnya terdapat dua sumber kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal (*external fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya, kecurangan eksternal mencakup: kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah; atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Tipe kecurangan yang lain adalah kecurangan internal (*internal fraud*). Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan.

Menurut Putri (2012) sumber kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu :

1. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*).
2. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*).Kecurangan mencakup :

1. Penggelapan (*embezzlements*)
2. Manipulasi pelanggaran karena jabatan (*malfeasance*)
3. Pencurian (*thefts*)
4. Ketidakjujuran (*dishonesty*)
5. Kelakuan buruk (*misdeed*)
6. Kelalaian (*defalcation*)
7. Penggelapan pajak (*withholding*)
8. Penyuapan
9. Pemerasan
10. Penyerobotan
11. Penyalahgunaan (*missappropriation*)
12. Fraudulent

Klasifikasi Kecurangan

Kecurangan Ditinjau Dari Sisi Korban Kecurangan

Menurut Lundu (2019) Kecurangan dari sisi korban dibedakan menjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian entitas organisasi dan kecurangan yang ditunjukkan untuk kepentingan entitas atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

1. Kerugian yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi

Kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak intern dan pihak ekstern organisasi dan merugikan bagi organisasi. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern organisasi antara lain :

- a. Meningkatkan upah melalui penambahan karyawan.
- b. Kecurangan pengadaan barang dengan *mark up* atau pengelambungan harga.
- c. Manipulasi dengan pengadaan barang/jasa fiktif.
- d. Kecurangan oleh leveransir, pemasok, kontraktor melalui pengiriman barang yang lebih kecil.

2. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk kecurangan antara lain :

- a. Merendahkan biaya atau kerugian
- b. Meningkatkan penjualan atau keuntungan
- c. Merugikan pemerintah dari penerimaan pajak
- d. Merugikan pemberi kerja
- e. Meningkatkan biaya didalam kontrak kerja

Kecurangan Ditinjau Dari Sisi Pelaku Kecurangan

Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu kecenderungan dari dalam organisasi (intern), dari luar organisasi (ekstern), dan melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi (kolusi). Kecurangan oleh pelaku intern organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan karyawan.

1. Kecurangan manajemen (*Management Fraud*)

Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang disengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut.

Kecurangan fraud dilakukan oleh manajer puncak dalam suatu perusahaan yang dengan sengaja memberikan data informasi yang salah kepada para pemegang saham, kreditur, fraktur, maupun auditor independen. Pada umumnya dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang keliru dengan maksud memberikan gambaran keuntungan perusahaan yang besar dan keuntungan yang sehat (*overstated*), atau sebaliknya tergantung untuk pihak manakah laporan keuangan itu ditujukan.

2. Kecurangan karyawan (*Non-Management Fraud*)

Non management fraud merupakan tindakan-tindakan tidak jujur di dalam suatu perusahaan/organisasi yang dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan

perpindahan aktiva/aset dari pemberi kerja, dan merupakan tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi.

3. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (Ekstern)

Kecurangan dari pihak luar organisasi antara lain dilakukan oleh pemasok, levensir dan oleh kontraktor, dengan cara :

- a. Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah
- b. Penyerahan pekerjaan dengan kualitas yang rendah
- c. Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan

4. Kecurangan yang melibatkan orang Dalam dan Orang Luar organisasi

Kecurangan ini dilakukan melalui kerjasama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan antara orang-orang dalam dan luar organisasi, seperti :

- a. Pimpinan instansi/proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang akan dijadikan dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai.
- b. Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tanpa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet di kemudian hari.

Secara umum kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu :

1. Management Fraud (kecurangan manajemen)

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime, karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja warna putih dan kerahnyapun putih. Kecurangan manajemen ada dua tipe antara lain:

1. Kecurangan jabatan.
2. Kecurangan korporasi (misalnya manipulasi pajak)
 2. Employee Fraud (kecurangan karyawan)

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan melakukan kecurangan pada manajemen maka kesempatan melakukan kecurangan pada bawahan relatif kecil. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai wewenang karena pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kemungkinan melakukan kecurangan

3. Computer Fraud (kecurangan computer)

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan komputer antara lain untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu kantor/perusahaan. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer diluar peruntukan yang syah dan perusakam atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri.

Jenis- Jenis Kecurangan Akuntansi

Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) dalam Lundu (2019) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Occupational Fraud* menggolongkan kecurangan menjadi tiga yaitu:

1. Korupsi

Korupsi adalah bagian dari *fraud* yang dilakukan pegawai pemerintahan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan standard operasional organisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi kepentingan pribadi. Menurut Sumarwani (2011), korupsi adalah kerusakan atau kebobrokan, yang artinya menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk dan disangkutkan pada ketidakjujutan seseorang terhadap keuangan. Korupsi didalam pembahasan ini adalah konflik kepentingan, suap, pemberian illegal, dan pemerasan.

a. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika pegawai memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi yang bertujuan untuk menambah keuntungan pribadi dan berdampak merugikan Negara.

b. Suap

Suap merupakan penawaran, pemberian, penerimaan/permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang dapat berdampak buruk atau dapat merugikan Negara.

c. Pemberian Illegal

Pemberian illegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian illegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, namun hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atau pengaruh yang dia berikan dalam kesempatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.

2. Penyalahgunaan Aset

Maksud dari penyalahgunaan aset adalah pengambilan aset perusahaan secara illegal atau tidak sah dan melawan hukum. *Fraud* dalam penyalahgunaan aset dapat berupa :

- a) *Lapping*, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dengan menggunakan uang yang didapatkan dari pendapatan suatu daerah. Uang tersebut tidak disetorkan pada instansi terkait namun digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- b) *Kitting* atau penggelapan dana, dimana adanya bentuk penggelembungan dana, atau adanya dana mengambang. Dana mengambang adalah dana yang ditarik dari suatu bank, kemudian disetor ke bank lainnya, ditarik lagi dan disetor lagi, begitu dan begitu seterusnya. Bergerak dan terus menerus bergerak sehingga tidak berhenti pada suatu bank saja.
- c) *Skimming*, atau penjarahan, dimana uang dijarah sebelum dicatat dalam pembukuan. Dengan kata lain, dana diambil sebelum adanya pembukuan.

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Fraud laporan keuangan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saju material laporan keuangan yang merugikan Negara. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh manajemen. Hal ini dapat menyebabkan adanya dorongan untuk menyajikan sinyal positif dari investor dan kreditor sehingga tertarik menanamkan modalnya. Padahal laporan keuangan tersebut mengandung unsur *fraud* dalam

penyusunan prediksi tingkat keuntungan yang diharapkan investor dan kreditor tidak sesuai sehingga dapat merugikan.

Menurut Gusnardi dalam Lundu (2019) kecurangan jenis ini dapat dikategorikan dalam :

- a. *Timing difference*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
- b. *Ficittious revenues*, menciptakan pendapat yang sebenarnya tidak terjadi
- c. *Concealed liabilities and expense*, yaitu menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan agar laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d. *Improrer disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
- e. *Improrer asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atas asset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya

Indikator Kecurangan Akuntansi

Indikator Pengukuran Kecurangan Akuntansi Indikator yang digunakan untuk mengukur Kecurangan Akuntansi diambil dari Standar Profesional Akuntan Publik (2011) Seksi 316, yaitu :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.

3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
4. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/ penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.
5. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan Akuntansi

Menurut teori *Fraud Triangle Cressey* dalam Albrecht (2014) telah menyatakan tentang teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) pada penelitian sebelumnya, yaitu bahwa Kecurangan Akuntansi disebabkan oleh dorongan/tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*). Elsaidah (2020) Banyak hal yang dapat menyebabkan fraud terjadi di dalam organisasi seperti dalam Karyono (2013), ACFE mengelompokkan penyebab fraud ke dalam dua bentuk sebagai berikut :

- a. *Internal fraud* yaitu kecurangan yang terjadi secara alami karena lemahnya sistem pengendalian dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud.
- b. *System control fraud* yaitu kecurangan yang terjadi karena lemahnya sistem pengendalian dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian internal bekerja.

Sedangkan G.Jack Bologna dalam Diaz (2013) menjelaskan penyebab fraud ke dalam GONE yaitu :

1. *Greed* (keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang. Hal yang berhubungan dengan keserakahan (*Greed*) adalah moral yang sangat rendah. Disebut moral yang sangat rendah karena serakah berkaitan dengan perbuatan fraud yang pasti dilakukan sudah berulang kali sehingga dianggap hal biasa dan bukan merupakan sesuatu perbuatan yang salah serta sudah melampaui batas kebutuhan manusia.

2. *Oppurtunity* (kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Kesempatan (*Oppurtunity*) untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek fraud. Kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan fraud daripada karyawan.

3. *Need* (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menjang hidupnya secara wajar. Hal ini menyangkut motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan (*need*) yang mendorong pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang memiliki akses yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat

iabekerja. Dalam hal orang tersebut merasa tertekan oleh kebutuhannya maka ia dapat terdorong untuk melakukan fraud.

4. *Exposure* (pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Pengungkapan (*Exposure*) suatu fraud belum menjamin tidak terulangnya fraud baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Setiap pelaku fraud seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkapkan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Semakin besar hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor *Greed dan need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku fraud (disebut juga faktor individual). Kesenakahan dan kebutuhan merupakan hal yang bersifat sangat personal sehingga sulit sekali dapat dihilangkan. Sedangkan faktor *opportunitiy dan exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud (disebut juga faktor generik/umum).

Kecurangan di Sektor Pemerintahan

Salah satu jenis tindakan kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Menurut Susanto dalam Rifqi (2013) korupsi pada level pemerintahan daerah adalah sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi.

Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintahan cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP (2004) dalam Lundu (2019) mengabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut :

Dari segi penerimaan

1. Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, Retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia
2. Manipulasi restitusi pajak
3. Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya
4. Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea
5. Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya.

Dari segi pengeluaran :

1. Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif
2. Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan
3. Penggelembungan (mark-up) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar.
4. Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai ekspektasi
5. Program bantuan social atau penanggulangan bencana yang salah sasaran

Pencegahan Kecurangan

Fraud adalah seperti penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada organisasi yang bebas dari fraud, karena sebaik apapun

strategi anti fraud dan konsultan yang menyusunnya, permasalahannya kembali ke manusia. Menurut Steve Alberht dalam Yosua (2019), Alberht mengelompokkan pencegahan fraud ke dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Pencegahan fraud dengan budaya kerja (*Soft Control*)

Pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit fraud dengan menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong. Di dalam budaya terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan saling tolong-menolong yaitu:

a. Menyusun dan mengkomunikasikan Kode Etik (*code of conduct*) yang mudah dipahami dan dihormati, yang selanjutnya adalah memantau keefektifan implementasi kode etik dan menegakkan aturan bila ada yang melanggar.

b. Memilih atau mempekerjakan orang-orang yang jujur melalui penyaringan-penyaringan latar belakang perilaku dan riwayat penyimpangan serta mendidik pegawai tentang kesadaran bahwa fraud dan program anti fraud di perusahaan

c. Menyediakan program yang membantu masalah finansial, psikologi, atau social pegawai

d. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

2. Pencegahan Fraud dengan Pengendalian Intern dan Tata Kelola

Pencegahan fraud dengan pengendalian intern dan tata kelola terdiri dari :

- a. Menerapkan pengendalian intern yang baik untuk mencegah dan mendeteksi fraud
- b. Mencegah terjadinya kolusi
- c. Mendorong pihak ketiga agar mematuhi kebijakan perusahaan termasuk yang terkait dengan hubungan bisnis yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
- d. Memantau dan mengenal pegawai khususnya peilaku yang menyimpang sehingga dapat lebih dini membina pegawai tersebut
- e. Sistem pelaporan atau pengaduan fraud (*tips hotline* atau *whistleblower system*)
- f. Hukuman, ketakutan pelaku dan pelaku potensi akan hukum yang jelas dan tegas menghalangi terjadinya perbuatan tidak jujur dan fraud

2.2 Moralitas Individu

2.2.1 Pengertian Moralitas Individu

Menurut Bertens dalam Yulina , moralitas (dari kata sifat latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Welton dalam Eliza (2015) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan Liyanarachi dalam Mulia dkk (2017) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi

perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika.

Moral menurut Suseno dalam Ananda (2017) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Moralitas Individu adalah seperangkat nilai yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan, atau suatu sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia.

2.2.2 Penalaran moral

Penalaran moral menurut Kohlberg dalam (Rahmat, 2018) mendefenisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan.

Kemampuan penalaran moral merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memakai cara berpikir tertentu yang dapat menerangkan apa yang telah dipilihnya, mengapa melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan.

Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal.

Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah, akan lebih memberi penjelasan dari pada memperhatikan perilaku seseorang atau bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah. Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial-moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penalaran moral adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan suatu penilaian atau mempertimbangkan nilai-nilai perilaku mana yang benar dan salah atau mana yang baik dan buruk, yang timbul dari hati nurani dan bukan merupakan paksaan dari luar dirinya, yang disertai rasa penuh tanggungjawab serta pengalaman sosial yang turut mempengaruhi perbedaan penilaian ataupun pertimbangan dalam diri individu tersebut.

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi Penalaran Moral

Menurut Kohlberg ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral yaitu sebagai berikut :

a. Kesempatan pengambilan peran

Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial seperti situasi dimana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai dan standar orang lain.

b. Situasi moral

Setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusiakan dan melibatkan keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas (tahap 1). Dalam lingkungan yang lain, keputusan didasarkan pada pertimbangan pada system yang tersedia (tahap 4 atau lebih tinggi). Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral.

c. Konflik moral kognitif

Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi dari pada anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak adalah keluarga. Kohlberg ,memandang bahwa pengaruh utama dari keluarga adalah pada diskusi antara orangtua dengan anak mengenai nilai-nilai dan norma, dari pada pengalaman anak sendiri akan disiplin, hukuman, dan hadiah dari orangtua.

Kohlberg juga menyatakan bahwa penalaran moral dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi (seperti pendidikan) dan pengalaman

sosiomoral. Pendidikan adalah prediktor yang kuat dari perkembangan penalaran moral, karena lingkungan pendidikan yang lebih tinggi menyediakan kesempatan, tantangan dan lingkungan yang lebih luas yang dapat merangsang perkembangan kognitif. Berdasarkan uraian di atas maka ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu kesempatan alih peran, situasi moral, konflik moral kognitif, keluarga, dan pendidikan.

2.2.4 Indikator-Indikator Moral

Menurut Teori Kohlberg dalam Marsini dkk (2019) , berdasarkan teori Kohlberg maka hasil dari indikator-indikator moralitas individu yaitu:

1. Penalaran Moral didasarkan hukum

Penalaran moral didasarkan atas hukuman dan individu taat karena orang lain menuntut mereka untuk taat. Selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku karena Hukum bersifat memaksa, sehingga barang siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi

2. Penalaran Moral didasarkan atas imbalan

Penalaran moral ini dikendalikan oleh sebuah imbalan atau biasa disebut dengan hadiah dan hukuman eksternal. Dengan kata lain aturan di kontrol oleh orang lain (eksternal) dan tingkah laku yang baik akan mendapatkan hadiah sedangkan tingkah laku yang buruk akan mendapatkan hukuman.

3. Menyadari kewajibannya

Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan individualnya sendiri (pribadi). menyadari bahwa kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. ntuk dapat hidup secara

harmonis kelompok sosial harus menerima peratran yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya.

4. Berbuat baik

Selalu berbuat baik antar pribadi ataupun kelompok dengan berbuat baik maka akan mengurangi tindak kecurangan akuntansi

5. Berkembangnya Norma Etik (kata hati)

Norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Dalam artian hubungan antara masyarakat dengan dengan seseorang terdapat dua unsur subjektif, apakah perilaku tersebut baik atau tidak baik, apakah perilaku tersebut sesuai moral atau tidak bermoral.

2.3 Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Anastasia dan Diana dan Lilis Setiawati dalam Friska morina (2018) mengemukakan bahwa Pengendalian Internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Dengan adanya Pengendalian internal diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Didalam sektor pemerintahan sistem pengendalian intern juga diterapkan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP). Menurut Angelina dkk (2017) dalam Yosua (2019) Sistem Pengendalian ini sangat penting dalam

melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian maka kecurangan yang mungkin dilakukan pegawai dapat diminimalisir. Maka dari itu setiap entitas pemerintah membuat dan menjalankan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan organisasi.

Pada Pemerintahan di Indonesia, Sistem Pengendalian Internal diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian internal pemerintah. Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain PP Nomor 60 tahun 2008, PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah juga memiliki pengertian mengenai sistem pengendalian internal. Menurut PP Nomor 8 tahun 2006 Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan dari pengertian diatas diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dibuat oleh manajemen untuk memberi keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengurangi kerugian atau ancaman keamanan dalam informasi

2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan tentu memiliki suatu tujuan saat membuat rancangan sistem pengendalian internal. Terdapat 3 tujuan umum perusahaan terkait pengendalian internal menurut Elder J. et al (2012) dalam Siboro (2021) sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektifitas Organisasi, yaitu dengan adanya pengendalian dalam suatu perusahaan, maka pengguna sumber daya perusahaan akan lebih efektif dan efisien guna mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan terkait tingkat akurasi informasi keuangan kegiatan operasional perusahaan yang digunakan para pemakai laporan keuangan.
2. Keandalan Laporan Keuangan, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab manajemen baik secara hukum maupun profesional dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk para investor, kreditor, dan para pemakai lainnya. Manajemen bertanggung jawab bahwa informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan telah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pengendalian internal yang efektif bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan ini.
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan, yaitu suatu entitas baik perusahaan publik, perusahaan non publik atau organisasi nirlaba harus mematuhi aturan hukum serta ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan langsung dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan akuntansi, maupun

peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan akuntansi seperti perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil.

2.3.3 Karakteristik Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Internal

Karakteristik penyelenggaraan kegiatan pengendalian internal tertuang dalam PP No 60 tahun 2008. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian digunakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti diharapkan.

Kegiatan Pengendalian Internal dijalankan oleh seluruh pegawai dan pejabat dalam pemerintah untuk menjamin berjalannya pemerintahan yang

bebas dari kecurangan. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik maka dilakukan kegiatan pengendalian yang terdiri atas :

1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumberdaya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas asset
5. Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Dengan dilakukannya kegiatan pengendalian intern dalam pemerintah dapat mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam mengukur dan mendeteksi fraud. Pengendalian intern pemerintah menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu. Peraturan yang ada bukan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

2.3.4 Indikator Pengendalian Internal

Kerangka pengendalian internal yang telah diterima di sebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka pengendalian internal COSO yang memiliki lima komponen kerangka pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, dan komunikasi (Elder dalam Nurul, 2017). Kerangka pengendalian internal COSO tertuang dalam PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Vani Adelin (2013)	Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi Variabel independen : Pengaruh pengendalian intern, ketaatan aturan dan perilaku tidak etis	Hasil dari penelitian : Pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Audry Regita Pramesti, Putri Wulanditya (2021)	Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi Variabel independen : Moralitas individu, kesesuaian kompensasi	Hasil dari penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara individu yang memiliki moralitas tinggi dan individu yang memiliki moralitas rendah terhadap kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi.
Novita Puspasari (2012)	Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi Variabel independen : Pengaruh moralitas	Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal. Kondisi elemen

	individu dan pengendalian internal	pengendalian internal tidak mempengaruhi individu dengan level moral tinggi untuk cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sedangkan individu dengan level moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal.
Yully Novikasari dkk (2017)	<p>Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi</p> <p>Variabel independen : Pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian intern pemerintah, dan ketaatan aturan akuntansi</p>	<p>Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, SPIP berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p>
Asni Sovia (2017)	<p>Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi</p> <p>Variabel independen : Sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen</p>	<p>Hasil Penelitian : Sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis dan moralitas manajemen berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p>
Yulina Eliza (2015)	<p>Variabel dependen : Kecenderungan kecurangan akuntansi</p> <p>Variabel independen : Pengaruh moralitas individu dan</p>	<p>Hasil Penelitian : Moralitas individu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan Pengendalian</p>

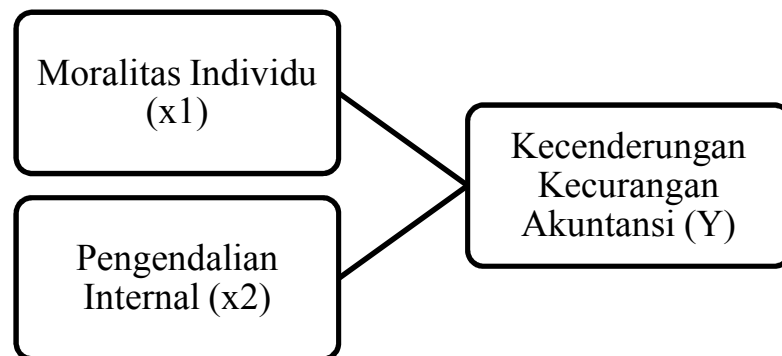
	pengendalian internal	internal berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Triska Febriani(2020)	Variabel dependen : Kecurangan Akuntansi (Fraud) Variabel independen : Pengaruh faktor pengendalian Internal, Moralitas Individu, personal culture, independensi	Hasil Penelitian : pengendalian internal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi (fraud).Moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi (fraud).Personal culture berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi (fraud).Independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi (fraud).
Anggi Kirana Septiani , Cris Kuntadi , Rachmat Pramukty (2023)	Variabel dependen : Pencegahan kecurangan Variabel independen : Pengaruh budaya organisasi, moralitas individu, dan pengendalian internal	Hasil Penelitian : budaya organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan,budaya organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan,budaya organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh hubungan antara variabelterkait yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi terhadap variabel bebas yaitu moralitas individu dan pengendalian internal. Berdasarkan latar belakang

dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Pada penelitian ini akan dibahas jawaban sementara dari tinjauan pustaka yang telah dikemukakan maka ditemukan hipotesis pada penelitian ini yaitu :

1) Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Damayanti, Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan yang dapat diterima oleh masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Pengaruh moralitas individu dijelaskan pada level moral individu tersebut. Semakin tinggi level moral individu tersebut maka kecenderungan untuk

melakukan kecurangan akuntansi akan rendah, sedangkan jika level moral individu tersebut rendah maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

H1 : Moralitas Individu Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan Penelitian diatas maka peneliti melakukan penelitian ulang untuk mengetahui apakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

2) Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Suatu instansi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi atau lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisasikan perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi dalam instansi atau lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri (shintadevi, 2015). Maka semakin mengacu pada sistem pengendalian intern pemerintah maka akan memperkecil kecenderungan kecurangan akuntansi.

H2 : Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan penelitian diatas maka akan dilakukan pengujian ulang dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti ingin menguji kembali apakah pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Metode kuantitatif dalam Sugiyono (2020:16) yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proposal ini sebagai penunjang utama, maka obyek yang dipilih adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini melibatkan pegawai BPKAD dalam penanganan terhadap kasus-kasus kecurangan. Sehingga peneliti ingin melihat apakah dengan diterapkan pengendalian internal dan moralitas individu ini, akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di lingkungan kerjanya.

3.1.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan jumlah 60 pegawai.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dengan jumlah responden 60 pegawai.

Adapun kriteria dari responden yang ditetapkan sebagai sampel adalah:

1. Pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran di objek tersebut
2. Jenjang pendidikan pegawai minimal D3
3. Pegawai telah bekerja minimal 2 tahun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Alasan pemilihan sampel tersebut adalah pegawai yang menjabat posisi tersebut ikut serta dalam melakukan pekerjaan akuntansi sehingga dapat memberikan informasi kepada peneliti

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diambil.

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan basis data atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer diperoleh secara langsung oleh sumber utama melalui pengisian kuisisioner yang disebarkan langsung oleh peneliti kepada seluruh responden yang terkait pada permasalahan penelitian ini. Masing-masing kuisisioner disertai dengan surat permohonan pengisian kuisisioner beserta jaminan kerahasiaan data pribadi. Hasil dari kuisisioner tersebut juga diperoleh dari pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner berisi tentang variabel bebas (Moralitas Individu dan Pengendalian Internal), variabel terikat (Kecurangan Akuntansi) yang menggunakan skala sikap model likert.

Sugiyono (2015:134) berpendapat bahwa *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan *Skala Likert*, yaitu dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan alternatif sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skor Skala Likert

Skor	Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

3.4 Defenisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikan merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang menjadi variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecurangan adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja, yang dimaksud untuk mengambil hak orang atau pihak lain. Kecurangan dapat berbentuk korupsi, penyalahgunaan aser, serta pernyataan palsu atau salah pernyataan. Jadi, Variabel dependen adalah konsekuensi dari variabel independen.

b. Variabel Independen

Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah moralitas individu dan pengendalian internal. Moral merupakan hal yang sesuai

dengan keyakinan yang dapat diterima oleh masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia Pengendalian internal merupakan semua rencana organisasi yang dipilih untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan data.

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Instrumen
Moralitas Individu	Moralitas Individu adalah seperangkat nilai yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan, atau suatu sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia	1. Penalaran Moral didasarkan hukum 2. Penalaran Moral didasarkan atas imbalan 3. Menyadari kewajibannya 4. Berbuat baik 5. Berkembangnya Norma Etik (kata hati)	Likert	Kuisisioner
Pengendalian Internal	Proses integral yang pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 tahun 2008)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (PP No.60 Tahun 2008)	Likert	Kuisisioner
Kecenderunga	Kecurangan (fraud)	1. 1.Mani	Likert	Kuesioner

n Kecurangan Akuntansi (Y)	<p>perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan secara sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang yang berada didalam atau di luar organisasi agar mendapatkan keuntungan sendiri maupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.</p>	<p>pulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi</p> <p>2. 2. Representasi yang salah /penghilangan dari laporan keuangan</p> <p>3. 3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.</p> <p>4. 4. Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencuri</p>		
----------------------------	---	---	--	--

		an (penyal ahgunaa n/ penggel apan). 5. 5. Penyaji an laporan keuanga n yang salah disertai dengan catatan atau dokume n palsu		
--	--	--	--	--

3.5 Uji Instrumen Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

Validitas suatu instrumen penelitian akan ditentukan oleh proses penelitian yang akurat. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat dua jenis uji validitas yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini. Koefisien korelasi item-total dengan *bivariate pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut :

$$R_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2][\sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Dimana :

R_{ix} = Koefisien korelasi item-total

i = Skor item

x = Skor total

n = Banyaknya subjek

Menurut Ghozali (2009:53) pengujian validitas menggunakan signifikansi 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a) Apabila r hitung = r tabel maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, sehingga item-item pernyataan atau instrumen dapat dinyatakan valid.
- b) Apabila r hitung < r tabel maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item pernyataan, sehingga item-item pernyataan atau instrumen dapat dinyatakan tidak valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk menentukan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga dapat mengukur objek yang akan diukur. Tingkat reliabilitas suatu instrument diukur dengan menghitung besarnya nilai cronbach's alpha. Nilai cronbach's alpha dapat dikatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2009:47).

$$\text{Rumusnya : } \alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \alpha^2 XL}{\sigma^2 x} \right]$$

Dimana :

α = Cronbach's Coefficient alpha atau reliabilitas instrument

k = Jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan

$\sum \alpha^2 XL$ = Total dari varian masing-masing pecahan

$\sigma^2 x$ = Varian dari total skor

3.6 Metode Analisis Data

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Oleh karena itu untuk menganalisis masalah penelitian tersebut akan menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan program software SPSS. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah :

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistic yang berguna untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan proses analisis dan menentukan kesimpulan yang berlaku umum. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari rata-rata (*mean*), standardeviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

Analisis statistic deskriptif dalam penelitian ini kemudian akan dibagi menjadi dua bagian yaitu statistik deskriptif data demografi partisipan dan statistik deskriptif data variabel. Statistik deskriptif data variabel akan digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian khususnya mean dan deviasi standar yang dibagi dalam empat grup eksperimen.

Statistik deskriptif data demografi partisipan di bagian usia akan dikelompokkan dengan tabel distribusifrekuensi. Sugiyono (2007:32) menjelaskan bahwa tabel distribusi frekuensi disusun jika jumlah data yang disajikan cukup banyak sehingga jika disajikan dalam tabel biasanya menjadi tidak efisien.

Menghitung rentang data dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Data} = \text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum} + 1$$

Menghitung panjang kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas}$$

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi kategori berdasarkan Mean ideal (M_i) dan Standard Deviasi ideal (SD_i). Rumus untuk mencari M_i dan SD_i adalah :

$$\text{Mean ideal } (M_i) = \frac{1}{2} (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$\text{Standard Deviasi ideal } (SD_i) = \frac{1}{6} (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate*. Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan terdegradasi (Ghozali, 2009:29).

Uji *Kolmogorov Smirnov* adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik.

b. Uji Homogenitas

Homogeneity of variance yaitu variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen (Ghozali, 2013). Jika

terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada *homogeneity of variance* di dalam *cell* yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. SPSS memberikan test ini dengan nama *Levene's Test of Homogeneity of Variance*. Jika nilai *Levene's Test* signifikan (probabilitas $< 0,05$) maka grup memiliki varian yang berbedadan hal ini menyalahi asumsi. Jadi yang dikehendaki adalah *Levene's Test* tidak signifikan (probabilitas $= 0,05$).

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Two Way Analysis of Variance* dengan *Main Effect* dan *Interaction Effect* menggunakan program SPSS versi 20.0. Peneliti menerapkan taraf signifikansi 5% dalam penelitian ini. Kriteria untuk pembuatan keputusannya adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima; Jika nilai signifikansi $= 0,05$ maka H_1 diterima atau menolak H_0 .

3.8 Uji t (Secara Parsial)

Menurut Ghozali, (2013:98) Uji t atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila tingkat signifikan $t < \alpha = 0,05$ ($\text{Sign } t < \alpha$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

3.9 Uji F (Secara Simultan)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut :

1. Menghitung besarnya F penelitian. Besarnya F penelitian terdapat pada hasil perhitungan SPSS
2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0,05$
3. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :
H0 diterima jika $F < 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{table}$
H0 ditolak jika $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{table}$

3.10 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

